

JURNAL EL-KAHFI

Journal of Islamic Economics

Vol. 02 No. 02 Tahun 2021

e-ISSN Media Elektronik: 2722-6557

Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat

Fauziah Endri¹, Yeni Fafika Nengsih², Sabri³, Nasfi^{4*}

^{1, 2} Jurusan Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi

³ Jurusan Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi

⁴ Jurusan Perbankan Syariah, STES Manna Wa Salwa, Tanah Datar

¹ fauziah@gmail.com, ² yhe.ni@yahoo.com, ³ sabrisimabur@gmail.com, ⁴ nasfi.anwar@gmail.com

^{*)} Correspondent author: nasfi.anwar@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015-2019. Penelitian ini merupakan Penelitian asosiatif. Data Penelitian ini terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal yang berasal dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 – 2019, di peroleh dari Website Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. Data diolah dengan teknik analisis *Partial Least Squares* (PLS) dengan menggunakan *software smartPLS*.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Pendapatan Asli daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh dan signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh dan signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, Belanja Modal

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of economic growth, regional original income (PAD), general allocation funds (DAU) and special allocation funds (DAK) on the allocation of capital expenditures in districts and cities in West Sumatra province in 2015-2019. This research is an associative research. This research data consists of Economic Growth, namely Gross Regional Domestic Product (PDRB), PAD, DAU, DAK and Capital Expenditures derived from the Realization Report of Regency and City APBD in West Sumatra Province in 2015 – 2019, obtained from the Website of the Central Statistics Agency of Sumatra West. The data is processed by using Partial Least Squares (PLS) analysis technique using smartPLS software.

The results of the study show that: Economic growth has an effect and is significant on the allocation of capital expenditures. Regional Original Income has an effect and is significant on Capital Expenditure Allocation. The General Allocation Fund has an effect and is significant on the allocation of capital expenditure, and the special allocation fund has an effect and is significant on the allocation of capital expenditure.

Keywords: Economic Growth, PAD, DAU, DAK, Capital Expenditure

A. Pendahuluan

Pemerintah pusat melalui UU No. 32 Tahun 2004 telah memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah, maksudnya memberikan peluang untuk daerah dalam mengatur dan melaksanakan kewenangan atas gagasan tersendiri menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat dan potensi daerah setempat (Halim, 2004). Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap serta aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, terdiri dari belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud (Erlina, Rambe.O.S, 2015).

Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan dalam pembelian dan pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah (Martini et al., 2014). Belanja modal pemerintah kota dan kabupaten di Sumatera Barat berupa pengadaan tanah, alat-alat angkutan, alat-alat berat, alat-alat bengkel, peralatan dan perlengkapan kantor, alat-alat pertanian, komputer, mebeulair, peralatan dapur, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, penghias ruangan, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, penerangan jalan, konstruksi jalan, jaringan air, jembatan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon (BPS Sumbar, 2020).

Berikut ini rincian belanja modal data dari Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat dari tahun 2015 hingga tahun 2019 yang diperoleh dari website BPS Sumbar (BPS Sumbar, 2020).

Tabel.1

**Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran
Pemerintah Kabupaten/ Kota se Sumatera
Barat Tahun 2015-2019 (Ribuan Rupiah)**

Tahun	Belanja Modal	%
2015	Rp. 3.442.418.870.600	46,03
2016	Rp. 4.215.504.276.480	48,89
2017	Rp. 4.298.471.477.980	49,41
2018	Rp. 3.848.183.743.090	41,14
2019	Rp. 5.026.616.647.290	45,19

Sumber : (BPS Sumbar, 2020)

Fenomena yang terjadi yang mana terdapat perbedaan, umumnya belanja modal mengalami kenaikan setiap tahun, sedangkan untuk tahun 2018 mengalami penurunan. Menurut (Mentayani, 2013), setiap daerah mempunyai tingkat kemandirian daerah serta kemampuan keuangan yang tidak sama saat mendanai kegiatannya, mengakibatkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dan daerah lainnya. Mengatasi ketimpangan fiskal, pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN dalam mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi. Oleh sebab itu, adanya otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam membuat rencana keuangannya sendiri serta membuat kebijakan-kebijakan strategis yang berpengaruh pada kemajuan daerah (Mayasari et al., 2014). Bila dimana ketimpangan ini menyangkut pertumbuhan ekonomi pedesaan akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di pedesaan dalam rangka mengentas kemiskinan dan mempengaruhi kemajuan daerah yang berdampak kepada kesejahteraan (Nasfi, 2020).

Jumlah pendapatan daerah, besarnya pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan pembangunan daerah merupakan beberapa indikator yang mempengaruhi kesejahteraan pada suatu daerah. Dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk merupakan tanda dari pembangunan ekonomi sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut (Nasfi, Lutfi & Prawira, 2020). Salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan Pendapatan Asli Daerah (Sabri et al., 2019). Menurut (Sabri et al., 2019) sebagai sumber penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus ditingkatkan supaya dapat menanggung sebagian beban belanja yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Pasal 6

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, disebutkan sumber-sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Sabri et al., 2019).

Menurut penelitian terdahulu (Wandira, 2013), menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel PAD terhadap belanja modal. Terdapat pengaruh negatif antara belanja modal terhadap variabel DAU dan terdapat pengaruh antara variabel DAK terhadap belanja modal. Menurut (Syukri & Hinaya, 2019), secara simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh dengan belanja modal. Sedangkan, secara parsial, hanya PAD yang memiliki pengaruh dengan anggaran belanja modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, tidak memiliki pengaruh antara dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemajuan daerah. Sedangkan menurut (Aryani & Hari, 2019) pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, serta dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dengan belanja modal secara simultan. Secara parsial, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) memiliki pengaruh negatif serta tidak berpengaruh dengan belanja modal. Pendapatan Asli daerah memiliki pengaruh positif dan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial Dana alokasi umum berpengaruh positif dan berpengaruh terhadap belanja modal secara parsial. Inkonsistensi penelitian ini mendorong peneliti untuk dilakukannya penelitian

Penelitian ini mengacu pada jurnal penelitian Menurut (Syukri & Hinaya, 2019). Dalam penelitian ini, variabel penelitian yang digunakan menggunakan variabel-variabel yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh Menurut (Syukri & Hinaya, 2019). Variabel yang digunakan antara lain pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan variabel dependennya anggaran belanja modal sedangkan peneliti menggunakan Pengalokasian Belanja Modal (Syukri & Hinaya, 2019). Jumlah penduduk yang banyak ini sebagai modal penggerak roda

perekonomian di Sumatera Barat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat digunakan sebagai salah satu parameter untuk mengukur perencanaan pembangunan ekonomi dalam menentukan strategi dan kebijakan pembangunan dan memonitoring perkembangan kemajuan perekonomian (BPS Sumbar, 2020).

Berdasarkan data BPS Sumbar, Perekonomian Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 menurut PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 230,53 triliun rupiah dan untuk PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai 164,00 triliun rupiah. Nilai ini mengalami perubahan sebesar 8,02 triliun rupiah atau sekitar 5,14 persen dibandingkan tahun 2017. Ekonomi Provinsi Sumatera Barat tetap tumbuh di tahun 2018, akan tetapi terjadi perlambatan dibandingkan dengan tahun 2017 dimana ekonomi Sumatera Barat tumbuh sebesar 5,29 persen (BPS Sumbar, 2020). Terdapatnya peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak selalu diikuti oleh peningkatan belanja modal dan adanya peningkatan pendapatan asli daerah juga tidak selalu diikuti oleh kenaikan belanja modal yang signifikan. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

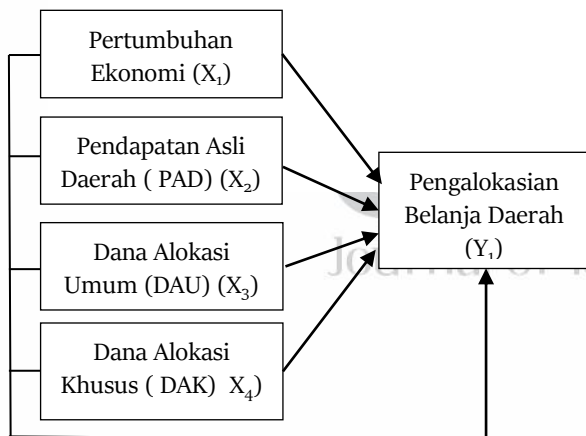
Suprayitno (2015) Dalam rangka perwujudan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mempunyai kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini terdapat banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah berkaitan dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah (Suprayitno, 2015). Pertama, tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, menyebabkan *fiscal gap*. Kemudian, kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan. Ketiga, berkurangnya dana bantuan dari pusat (tidak mencukupinya DAU dari pusat). Keempat, infrastruktur prasarana dan sarana umum yang lemah. Terakhir adalah belum diketahuinya potensi dari PAD yang mendekati kondisi riil. Berdasarkan prinsip otonomi yaitu nyata, luas dan bertanggungjawab, Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu faktor penting saat melaksanakan roda pemerintahan pada

sebuah daerah (Umam, 2014). Peranan pendapatan Asli Daerah untuk keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting untuk pelaksanaan otonomi daerah (Nasfi, Nagara, 2020), semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD, maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah begitu juga DAU, DAK yang mana nantinya dapat memajukan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berasal dari masalah PAD, DAU dan DAK terhadap pengalokasian Belanja Modal, maka kerangka konseptual dalam penyelesaian masalah sebagai berikut ;

Gambar. 1

Kerangka Konseptual



B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian asosiatif yang dipakai untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Karena untuk mengetahui hubungan variabel terikat yaitu pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Dana Alokasi Umum.

Populasi yang digunakan pada penelitian adalah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 Kabupaten/Kota. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini memakai metode *purpose sampling*, yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan dan menggunakan time series sebanyak 5 tahun dari 2016-2019.

Metode pengumpulan data dari data primer dari wawancara maupun observasi dan data sekunder diperoleh pada Laporan Realisasi Anggaran seluruh Kabupaten serta Kota yang ada di Sumatera Barat periode 2015-2019, yang diperoleh Website dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

Definisi Operasional Pengukuran

Penelitian ini memakai satu variabel terikat dan empat variabel bebas. Definisi operasional dari masing-masing variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel. 2

Definisi Operasional Pengukuran

No	Variabel	Definisi Operasional	Skala Ukur
1	2	3	4
1.	Belanja Modal (Y)	Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (BPS Sumbar, 2020).	Rasio
2	Pertumbuhan Ekonomi (X ₁)	Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang memiliki pengertian sebagai nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa serta tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul sebab berbagai aktivitas ekonomi pada suatu periode tertentu tanpa menimbang apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen (BPS Sumbar, 2020).	Rasio
3	Pendapatan Asli Daerah (X ₂)	PAD UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan “pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut	Rasio

		berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.	
4	Dana Alokasi Umum (X3)	DAU adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam mendanai kebutuhan daerah sebagai rangka pelaksanaan UU RI No.23 Tahun 2015.	Rasio
5	Dana Alokasi Khusus (X4)	Dalam UU No. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu, untuk tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.	Rasio

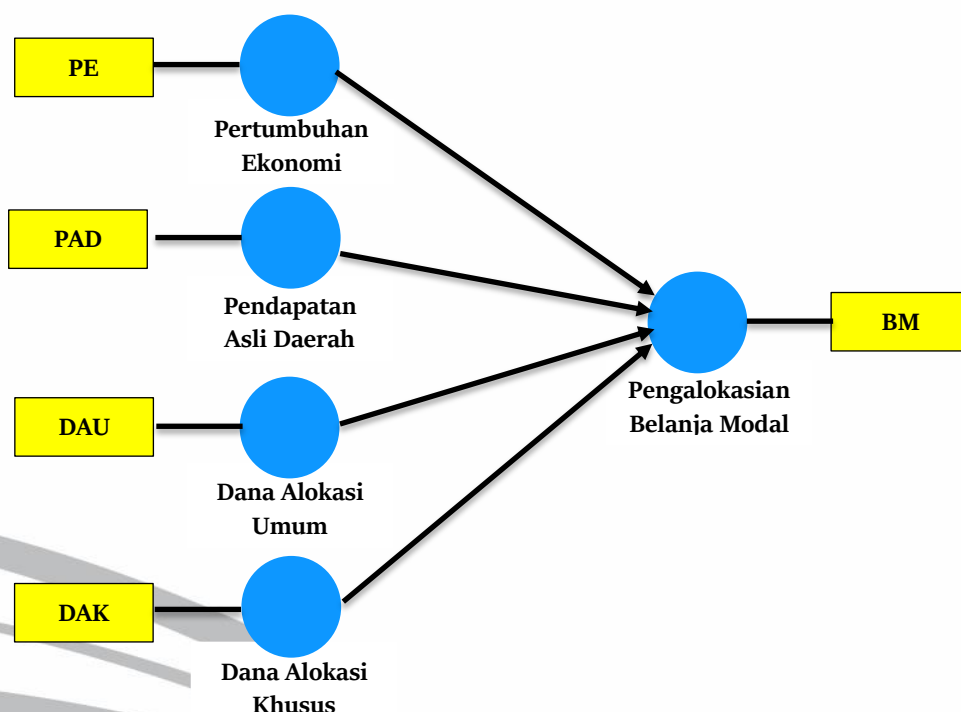
Analisis data dengan analisis kuantitatif dan kualitatif serta diolah dengan teknik analisis *Partial Least Squares* (PLS) dengan menggunakan *software smartPLS*.

Model Struktural (Inner Model), pada model struktural, yang disebut juga sebagai model bagian dalam (*inner model*) dimana semua variabel laten dihubungkan satu dengan yang lain dengan didasarkan pada teori substansi. Variabel laten merupakan sebuah konstruk pada model persamaan struktural yang secara langsung tidak dapat diukur (*unobserved variable*). Variabel laten terdiri dari eksogen dan endogen. Variabel laten eksogen merupakan variabel penyebab atau variabel tanpa didahului oleh variabel lainnya dengan tanda anak panah menuju ke variabel lainnya (variabel laten endogen).

Pengujian *inner model* atau model struktural digunakan dalam melihat hubungan antara konstruk atau variabel laten. Hal ini dilihat pada nilai *R-square* dari model penelitian dan dengan melihat besar koefisien jalur strukturalnya. Semakin tinggi nilai R^2 , berarti semakin baik model prediksi pada model penelitian yang diajukan. Model yang kuat ditunjukkan dengan nilai 0,67, model yang moderat ditunjukkan dengan nilai 0,33 dan model yang lemah ditunjukkan dengan nilai 0,19 (Ghozali, 2016). Nilai R^2 dipakai dalam menjelaskan pengaruh variabel laten (*independen*) terhadap variabel laten (*dependen*) atau seberapa besar pengaruhnya. Diagram path pada model persamaan struktural digambarkan sebagai berikut ;

Gambar. 1

Diagram Path Pengalokasian Belanja Modal



Sumber : Hasil Pengolahan aplikasi SmartPls 2021

Dari gambar diatas, dikonversi ke dalam persamaan sebagai berikut:

Pengalokasian Belanja Modal = γ_1
 Pertumbuhan Ekonomi + γ_2 Pendapatan Asli Daerah + γ_3 Dana Alokasi Umum + γ_4 Dana Alokasi Khusus.

Variabel $Y = \gamma_1$ (Variabel X_1) + γ_2 (Variabel X_2) + γ_3 (Variabel X_3) + γ_4 (Variabel X_4)

Dimana :

$\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ = nilai koefisien path

Pengujian hipotesis dapat diperhatikan dari nilai t-statistik untuk menunjukkan tingkat signifikansi. Untuk pengujian hipotesis memakai nilai statistik, maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96 melalui proses *bootstrapping*. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah:

1. Jika $\text{Sig} > 0,05$ dan $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima atau H_1 ditolak.
2. Jika $\text{Sig} < 0,05$ dan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak atau H_1 diterima.

C. Hasil dan Pembahasan

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Suprayitno, 2015), pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi perekonomian sebuah negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu yang mengalami proses perubahan. Dalam mengetahui perkembangan perekonomian pada sebuah daerah untuk suatu periode tertentu adalah salah satu kategori penting dengan menggunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB yang dipakai merupakan PDRB Konstan yang memperlihatkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung memakai harga yang berlaku dalam satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB Konstan dipakai untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil pada tiap tahunnya.

Berdasarkan data olahan dengan log perkembangan PDRB di Kota serta Kabupaten se-Sumatera Barat pada tahun 2015 sebesar 13,55 dan tumbuh menjadi 13,65. Pertumbuhan paling rendah dialami oleh Kepulauan

Mentawai pada tahun 2015 log PDRB sebesar 12,40 hanya tumbuh menjadi 12,48. Rata – rata pertumbuhan laju log PDRB dengan harga konstan ini sebesar 12,79 dari tahun 2015 ke tahun 2019.

Pendapatan Asli Daerah

Untuk memperluas potensi ekonominya setiap daerah mempunyai kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, diarahkan supaya pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing.

Berdasarkan olahan data dengan log menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 hingga 2019 mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan setiap tahunnya dimasing-masing Kota serta Kabupaten. Log Pendapatan Asli Daerah Tertinggi yaitu Kota Padang di tahun 2017 sebesar 11,74 sedangkan log PAD terendah dimiliki oleh Pariaman dimana mengalami penurunan PAD dari 2015 ke 2016 menjadi log 10,48 ke log 10,47.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber berdasar pada pendapatan APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah dalam mendanai kebutuhan Daerah untuk rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dari olahan data dengan log, memperlihatkan bahwa Padang adalah sebagai Kota yang memiliki log Dana Alokasi Umum tertinggi yakni sebesar 12,03 dan menjadi 12,07 sedangkan sawahlunto memiliki log Dana Alokasi Umum terendah dari masing-masing Kabupaten dan Kota dari 11,54 di tahun 2015 ke tahun 2019 sebesar 11,59.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu, yang bertujuan dalam membantu mendanai kegiatan khusus (yang merupakan urusan daerah) dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK berguna untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pertanian,

kelautan dan perikanan, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

Hasil olahan data bahwa secara umum dari tahun 2015 hingga tahun 2015 Log Dana Alokasi Khusus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Hanya saja untuk tahun 2017 kabupaten serta kota se-Sumatera Barat mengalami penurunan Dana Alokasi Khusus. Memperlihatkan bahwa Padang Pariaman memiliki log Dana Alokasi Umum tertinggi yakni sebesar 11,11 menjadi 11,53 sedangkan Padang Panjang memiliki log Dana Alokasi Khusus terendah di tahun 2019 yakni 10,74.

Pengalokasian Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja Pemda yang kegunaannya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Pemda harus bisa menggunakan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal adalah salah satu langkah bagi Pemda dalam

menyediakan pelayanan kepada publik terkhusus kepada masyarakat yang berada disuatu daerah.

Dari olahan data menunjukkan bahwa tahun 2015 ke tahun 2016 menghadapi peningkatan Pengalokasian Belanja Modal ditahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten serta Kota se-Sumatera Barat. Memperlihatkan bahwa Kota Padang adalah daerah yang memiliki log Pengalokasian Belanja Modal tertinggi 11,46 dan menjadi 11,74. sedangkan sawahlunto dengan log Pengalokasian Belanja Modal terendah 11,11 di tahun 2019.

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Data log Pertumbuhan Ekonomi berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pengalokasian Belanja Modal diolah dengan menggunakan statistik deskriptif sehingga didapati hasil sebagai berikut:

Tabel. 3
Analisis Deskriptif

Ukuran Deskriptif	Maksimum	Minimum	Rata - Rata	Standar Deviation
Pertumbuhan Ekonomi	1,365.000	1,232.000	1,279.242	30.872
Pendapatan Asli Daerah	1,047.000	1,047.000	1,092.326	25.103
Dana Alokasi Umum	1,207.000	1,154.000	1,176.084	13.310
Dana Alokasi Khusus	1,153.000	1,043.000	1,111,663	25.606
Pengalokasian Belanja Modal	1,174.000	1,084.000	1,136,000	16.907

Sumber : Data yang diolah menggunakan SmartPLS

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa hasil Log :

1. Log Pertumbuhan Ekonomi dengan menggunakan PDRB Kabupaten serta Kota pada tahun 2015-2019, nilai terendah sebesar 1,232.000 dan nilai log terbesar sebesar 1,365.000 dengan rata-rata dari log Pertumbuhan Ekonomi adalah 1,279.242 dan standar deviasi 30.872. Dimana nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata yang berarti data ini tersebar dengan baik dan tidak terdapat kesenjangan yang terlalu signifikan antara nilai maksimum dengan nilai minimum.
2. Log PAD Kabupaten dan Kota tahun 2015-2019, nilai log terendah sebesar 1,047.000 dan nilai log terbesar sebesar 1,174.000

dengan rata-rata dari log Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu 1,092.326 dan standar deviasi 25.103. Dimana nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata, artinya data ini tersebar dengan baik dan tidak terdapat kesenjangan yang terlalu signifikan antara nilai maksimum dengan nilai minimum

3. Log DAU Kabupaten dan Kota tahun 2015-2019, nilai log terendah sebesar 1,154.000 dan nilai log terbesar sebesar 1,207.000 dengan rata-rata dari log Dana Alokasi Umum yaitu 1,176.084 dan standar deviasi 13.310. Disini terlihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata yang berarti data ini tersebar dengan baik dan tidak terdapat kesenjangan yang terlalu

signifikan antara nilai maksimum dengan nilai minimum.

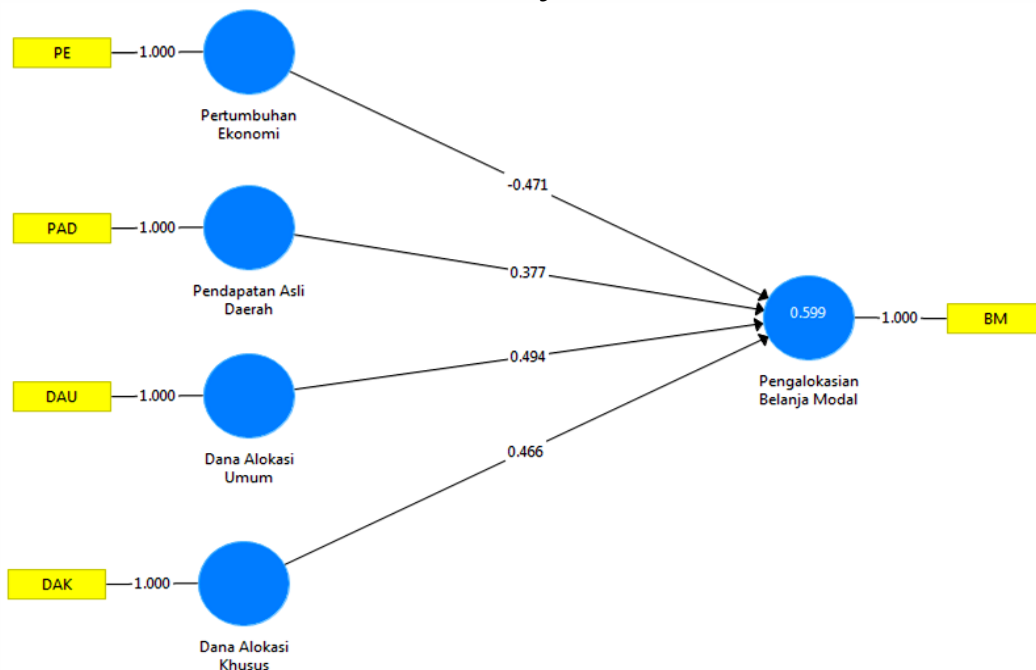
4. Log DAK Kabupaten dan Kota tahun 2015-2019, nilai log terendah sebesar 1,043.000 dan nilai log terbesar sebesar 1,153.000 dengan rata-rata dari log Dana Alokasi Khusus adalah 1,111.663 dan standar deviasi 25.606. dimana nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata artinya data ini tersebar dengan baik dan tidak terdapat kesenjangan yang terlalu signifikan antara nilai maksimum dengan nilai minimum.
5. Log Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten dan Kota tahun 2015-2019, nilai log

terendah sebesar 1,084.000 dan nilai terbesar sebesar 1,174.000 dengan rata-rata dari log Pengalokasian Belanja Modal adalah 1,135.358 dan standar deviasi 16.907. dimana nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata artinya data ini tersebar dengan baik dan tidak terdapat kesenjangan yang terlalu signifikan antara nilai maksimum dengan nilai minimum.

Hasil olahan data diagram jalur

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yang ditantarnya adalah variabel dependen dan variabel independen.

Gambar. 3
Koefisien Jalur



Sumber : Hasil Pengolahan Aplikasi SmartPls 2021

Persamaan Model :

$$Y = -0,471 X_1 + 0,377 X_2 + 0,494 X_3 + 0,466 X_4$$

Gambar 3 memperlihatkan nilai koefisien jalur (*path coefficient*) antara variabel Log Pertumbuhan Ekonomi, log Pendapatan Asli Daerah, log Dana Alokasi Umum serta log Dana Alokasi Khusus terhadap log Pengalokasian Belanja Modal.

1. Nilai koefisien jalur dari log Pertumbuhan Ekonomi adalah -0.471, yakni bernilai negatif pada pengalokasian belanja modal. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 satuan pada pertumbuhan ekonomi maka pengalokasian

belanja modal mengalami penurunan 1 satuan.

2. Nilai koefisien jalur dari log Pendapatan Asli Daerah yaitu 0.377, yang bernilai positif. Setiap kenaikan 1 satuan pada Pendapatan Asli Daerah maka terhadap pengalokasian belanja modal akan meningkat 1 satuan.
3. Nilai koefisien jalur dari log Dana Alokasi Umum yaitu 0.494 yang bernilai positif. Hal ini memiliki arti dimana pada setiap kenaikan 1 satuan pada Dana Alokasi Umum

maka terhadap pengalokasian belanja modal akan meningkat 1 satuan

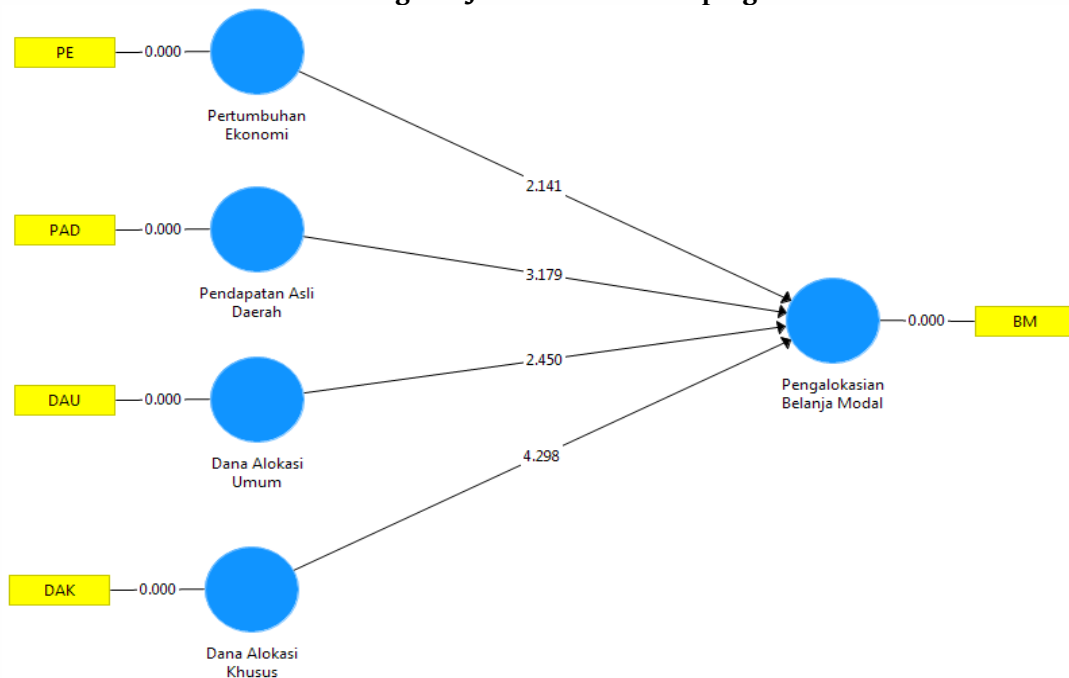
4. Nilai koefisien jalur dari log Dana Alokasi Khusus ialah 0.466 yang bernilai positif. Keadaan ini berarti setiap kenaikan 1 satuan pada Dana Alokasi Khusus maka terhadap pengalokasian belanja modal akan meningkat 1 satuan.

Berdasarkan Gambar 3, nilai koefisien jalur paling besar adalah berada pada variabel

Dana Alokasi Umum, yakni bernilai 0.494. Hal ini berarti Dana Alokasi Umum berkontribusi besar terhadap pengalokasian belanja modal. Sementara nilai koefisien jalur yang paling kecil adalah berada pada variabel Pertumbuhan Ekonomi, yakni bernilai -0.471. Hal ini berarti Pertumbuhan Ekonomi berkontribusi kecil terhadap pengalokasian belanja modal.

Pengujian Hipotesis

Gambar. 4
Diagram Jalur Hasil Bootstrapping



Sumber : Hasil Pengolahan Aplikasi SmartPls 2021

Uji hipotesis ini merupakan analisis kausalitas yang bertujuan dalam mengetahui hubungan antar variabel. Analisis kausalitas dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Variabel eksogen dinyatakan secara

signifikan berpengaruh terhadap variabel endogen jika nilai t statistik > t table dan nilai P-value < alpha 0.05. Hasil uji hipotesis dipaparkan pada gambar 4 dan Tabel 4 dibawah ini sebagai berikut.

Tabel. 4
Hasil Path Coefficient Model Jalur

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pertumbuhan Ekonomi - > Pengalokasian Belanja Modal	-0.471	-0.457	0.220	2.141	0.033
Pendapatan Asli daerah - > Pengalokasian Belanja Modal	0.377	0.368	0.119	3.179	0.002
Dana Alokasi Umum - > Pengalokasian Belanja Modal	0.494	0.473	0.202	2.450	0.015
Dana Alokasi Khusus - >					

Pengalokasian Belanja Modal	0.466	0.476	0.109	4.298	0.000
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Hasil Pengolahan Aplikasi SmartPLS 2021

Berdasarkan Gambar 4 dan Tabel 4 diatas menjelaskan bahwa :

1. Hipotesis menyatakan bahwa terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Belanja Modal secara parsial. Berdasarkan nilai *T-statistics* sebesar 2,144 lebih besar dari *T-table* 1,96 pada selang kepercayaan 95% dan pada taraf alpha 5%, nilai *p values* sebesar $0,033 < 0,05$. Demikian dapat disimpulkan hipotesis penelitian dapat diterima atau dapat dikatakan bahwa secara parsial terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Nilai original sample sebesar -0,471 maka Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Semakin naik Pertumbuhan Ekonomi maka Pengalokasian Belanja Modal akan menurun.
2. Hipotesis menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara parsial pada Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Berdasarkan nilai *T-statistics* sebesar 3,179 lebih besar dari *T-table* 1,96 pada selang kepercayaan 95% dan pada taraf alpha 5%, nilai *p values* sebesar $0,002 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan hipotesis penelitian dapat diterima atau dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh secara parsial pada Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Nilai original sample sebesar 0,377 maka Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah berarti Pengalokasian Belanja Modal akan meningkat.
3. Hipotesis menyatakan bahwa secara parsial terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

Berdasarkan nilai *T-statistics* sebesar 2,450 lebih besar dari *T-table* 1,96 pada selang kepercayaan 95% dan pada taraf alpha 5%, nilai *p values* sebesar $0,015 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diterima atau dapat dikatakan bahwa secara parsial terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Nilai original sample sebesar 0,494 maka Dana Alokasi Umum memiliki hubungan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Pengalokasian Belanja Modal akan meningkat.

4. Hipotesis menyatakan bahwa secara parsial terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Berdasarkan nilai *T-statistics* sebesar 4,298 lebih besar dari *T-table* 1,96 pada selang kepercayaan 95% dan pada taraf alpha 5%, nilai *p values* sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis penelitian dapat diterima atau dapat dikatakan bahwa secara parsial terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Nilai original sample sebesar 0,466 maka Dana Alokasi Khusus memiliki hubungan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Semakin tinggi Dana Alokasi Khusus maka Pengalokasian Belanja Modal akan meningkat.

Uji Outer Model (Measurement Model)

Uji validitas diskriminan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan nilai validitas suatu variabel bila dibandingkan dengan variabel lainnya. Pengujian *discriminant validity* dapat terlihat dari tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5
Hasil Uji Diskriminan Validity

	Dana Alokasi Khusus	Dana Alokasi Umum	Pendapatan Asli Daerah	Pengalokasian Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi
Pengalokasian Belanja Modal	0.698	0.678	0.549	1.000	0.571
Dana Alokasi Khusus	1.000	0.743	0.430	0.698	0.632

Dana Alokasi Umum	0,743	1.000	0.698	0.678	0.905
Pendapatan Asli Daerah	0,430	0.678	1.000	0.549	0.795
Pertumbuhan ekonomi	0,632	0.905	0.795	0.571	1.000

Sumber : Hasil Pengolahan Aplikasi SmartPls 2021

Salah satu cara untuk melakukan pengukuran validitas diskriminan adalah dilihat pada nilai Cross Loading setiap variabel yang seharusnya mempunyai loading lebih tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur, dibandingkan dengan indikator variabel laten lainnya. Hasil output dapat terlihat dari tabel 5 variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai angka yang lebih tinggi dari variabel lain, menunjukkan variabel memiliki tingkat diskriminan validity yang baik. Begitupun untuk variabel lainnya, dapat disimpulkan ke lima variabel memiliki tingkat diskriminan yang baik dan valid.

Pengujian R-Square**Tabel. 5**
Nilai R²

R Square		
Matrix		
	Original Sample	Sample Mean
Pengalokasian Belanja Modal	0.599	0.609

Sumber : Hasil Pengolahan Aplikasi SmartPls 2021

Berdasarkan hasil pengolahan data nilai R² yang tertera pada output di atas dapat dijelaskan bahwa variabel Pengalokasian Belanja Modal dijelaskan oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebesar 0.599 atau 59,90% sisanya 41,10% lainnya dijelaskan pada variabel lain diluar model.

Pengujian Collinearity Statistic (VIF)**Tabel. 5**
Collinearity Statistic (VIF)

Inner VIF Value	
	Pengalokasian Belanja Modal
Dana Alokasi Khusus	2.317
Dana Alokasi Umum	7.566
Pendapatan Asli Daerah	2.778
Pertumbuhan Ekonomi	7.761

Sumber : Hasil Pengolahan Aplikasi SmartPls 2021

Nilai VIF Inner digunakan untuk menilai multikolinieritas pada model struktural. Pengujian ini perlu untuk menilai dan menginterpretasi koefisien jalur (yaitu, kolinearitas diantara konstruksi (Becker as cited in SmartPLS Forum, 2020). Berdasarkan Tabel 4.4 nilai VIF untuk Dana Alokasi Khusus adalah 2.317 Dana Alokasi Umum nilai VIF 7.566, Pendapatan Asli Daerah yaitu 2.778 dan Pertumbuhan Ekonomi 7.761 sehingga tidak mengindikasikan multikolinieritas karena tidak diatas nilai 10.

Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian, untuk menguji kebenaran hipotesis mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Dari hasil pengujian hipotesis didapati seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan pada pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sampai dengan 2019. Hal ini terlihat dari uji hipotesis menggunakan Smart PLS nilai signifikansi dari nilai t dibawah dari nilai signifikan yang ditetapkan adalah 0,05 sehingga hipotesa yang diajukan dapat diterima dengan tingkat kebenaran 95%. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka Pengalokasian Belanja Modal akan Menurun pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sampai dengan 2019 dikarenakan bernilai negatif namun berpengaruh dan signifikan terhadap Pengalokasian belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mayasari et al., 2014), terdapat

pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.

Semakin baik pertumbuhan ekonomi yang diperoleh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat maka Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota tahun 2015 - 2019 juga akan semakin meningkat. Tetapi, faktanya pertumbuhan ekonomi tidak terlalu diperhitungkan sebagai acuan utama dalam penyusunan pengalokasian belanja modal. Adanya faktor lain yang mempengaruhi misalnya proses penyusunan anggaran setiap Kabupaten dan Kota yang juga mempertimbangkan kondisi sosial politik serta kebijakan dari masing masing kabupaten dan Kota di daerahnya selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sampai dengan 2019, hal ini terlihat dari uji hipotesis nilai signifikansi dari nilai t dibawah dari nilai signifikan yang ditetapkan yaitu 0,05 sehingga hipotesa yang diajukan diterima dengan tingkat kebenaran 95%. Artinya Apabila Pendapatan Asli Daerah terus meningkat maka Pengalokasian Belanja Modal akan meningkat pada Kabupaten serta Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sampai dengan 2019 juga ikut meningkat karena memiliki pengaruh yang positif. Pada penelitian ini hasilnya sejalan dengan hasil penelitian (Wertianti & Dwirandra, 2013), yang menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap alokasi belanja modal.

Semakin baik Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat maka Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 juga akan semakin meningkat. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan terpenting bagi sebuah daerah memenuhi belanjanya. Sumber Pendapatan Asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi, reklame, hotel dan restoran yang diharapkan

dapat menggali potensi daerah dikarenakan Provinsi Sumatera Barat Kabupaten dan Kota memiliki Potensi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah kerana merupakan Kota dengan Aktivitas Perdagangan dan alam yang indah sebagai tempat Pariwisata. Akan tetapi, tidak semua Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki Kontribusi yang sama karena dipengaruhi oleh perbedaan kondisi geografis, jumlah penduduk, budaya dan keadaan lainnya. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah memberi keleluasaan kepada daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat untuk mengalokasikan pada kegiatan yang dapat berdampak pada peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sampai dengan 2019, hal ini terlihat dari uji hipotesis nilai signifikansi dari nilai t dibawah dari nilai signifikan yang ditetapkan yaitu 0,05 sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima dengan tingkat kebenaran 95%. Artinya apabila Dana Alokasi Umum terus meningkat maka Pengalokasian Belanja Modal akan Meningkat pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sampai tahun 2019 juga akan meningkat karena berkontribusi besar. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maslikah, 2016), menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal.

Semakin baik Dana Alokasi Umum yang didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten serta Kota di Provinsi Sumatera Barat, maka Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 hingga tahun 2019 juga akan semakin meningkat. Apalagi pengealokasian dan di Kabupaten dan pedesaan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, serta tidak merusak lingkungan, maka hasilnya akan meningkatkan kesejahteraan di pedesaan (Nasfi, Aziz & Lutfi, Yunimar, Ahmad, 2020).

Dana Alokasi Umum memungkinkan daerah mampu memprioritaskan sesuai kebutuhan daerah untuk pelayanan kepada masyarakat. Dana Alokasi Umum memiliki angka yang besar dibandingkan penerimaan dari daerah lainnya yang mengindikasikan Belanja Modal masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten serta Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sampai tahun 2019. Hal ini terlihat dari uji hipotesis nilai signifikansi dari nilai t dibawah dari nilai signifikan yang ditentukan yaitu 0,05 sehingga hipotesis yang ditujukan dapat diterima dengan tingkat kebenaran 95%. Artinya Apabila Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan secara berkelanjutan maka Pengalokasian Belanja Modal akan meningkat pada Kabupaten serta Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sampai tahun 2019 karena berpengaruh positif.

Semakin baik Dana Alokasi Khusus yang diperoleh Pemerintah Kabupaten serta Kota di Provinsi Sumatera Barat, maka Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sampai tahun 2019 juga akan semakin meningkat. Penelitian ini searah dengan hasil studi dari (Syukri & Hinaya, 2019), yang secara simultan Pertumbuhan ekonomi, pendapatan Asli Daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan 19 Sampel dan pengujian hipotesis pada penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan:

- 1) Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sampai dengan 2019.
- 2) Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal pada

Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sampai dengan 2019.

- 3) Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sampai dengan 2019.
- 4) Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sampai dengan 2019

Daftar Pustaka

- Aryani, P. R., & Hari, K. K. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(2), 84-97.
- BPS Sumbar. (2020). *Badan Pusat Statistik Sumatera Barat*. BPS Sumatera Barat.
- Erlina, Rambe.O.S, R. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (Kedelapan). Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2004). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. *Yogyakarta: UPP AMP YKPN*.
- Martini, N. L. D. S., Cipta, W., & Suwendra, I. W. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 2(1).
- Maslikah, S. H. (2016). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus Pada Kab/Kota Di Propinsi Jawa Tengah)*.
- Mayasari, L. P. R., Sinarwati, N. K., Yuniarta, G. A., & AK, S. E. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

- pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Mentayani, I. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan. *InFestasi*, 9(2), 91-102.
- Nasfi, Aziz, Z., & Lutfi, Yunimar, Ahmad, L. (2020). Meningkatkan Nilai Ekonomis Sumberdaya Alam Secara Islami Buah Kelapa Menjadi Minyak Tanak (Studi Nagari/Desa Silungkang). *Elkahfi | Journal of Islamic Economics*, 1(01), 9-14.
- Nasfi, Lutfi, A., & Prawira, A. (2020). Pembangunan Drainase Berakibat Kepada Hak Pengguna, Problem Pengguna Jalan Dan Perkembangan Ekonomi (Studi Kasus Di Kota Bukittinggi). *Elkahfi | Journal of Islamic Economics*, 1(01), 15-21.
- Nasfi, Nagara, P. (2020). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Pedesaan Berwawasan Lingkungan Di Negara Berkembang. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen & Akunansi*, 2(1), 55-62.
- Nasfi, N. (2020). Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dalam Rangka Mengentas Kemiskinan di Pedesaan. *Jurnal EL-RIYASAH*, 11(1), 54-66. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jel.v11i1.8818>
- Sabri, S., Febrianti, E., Asnah, A., & Nasfi, N. (2019). Prosedur Pencairan dan Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pembangunan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam. *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)*, 4(02), 129-142. <https://doi.org/https://doi.org/10.36665/jusie.v4i02>
- Suprayitno, B. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(01), 106-112.
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 2(2), 30-37.
- Umam, I. K. (2014). Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(2).
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Wertianti, I., & Dwirandra, A. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan PAD dan DAU Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(3), 567-584.